

ABSTRAK

Sampah sudah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu pengelolaan secara komprehensif dan terpadu. Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diharapkan pengelolaan sampah akan menjadi lebih baik. Guna menindak lanjuti pengelolaan sampah di daerah kedudukan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sangat strategis karena berkaitan langsung dalam pengelolaan sampah di daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menganalisa data – data yang ditemukan selanjutnya dilakukan pendekatan yuridis melalui peraturan perundangan yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Kabupaten Demak belum memiliki kebijakan tentang sistem pengelolaan sampah yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan undang – undang yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dengan meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah terdiri dari aspek operasional, aspek hukum dan aspek kelembagaan. Di Kabupaten Demak dalam mengelola sampah saat ini masih menggunakan sistem lama yaitu kumpul, angkut dan buang. Aturan pengelolaan sampah masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1991 tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur pengelolaan sampah di daerahnya sehingga diperlukan peraturan daerah yang sesuai dengan undang – undang pengelolaan sampah. Saran yang diajukan peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Demak : perlunya mengubah paradigma sistem pengelolaan sampah, perlunya perhatian serius dari kepala daerah dalam sistem pengelolaan sampah, segera duduk bersama antara Bupati dan DPRD dalam membuat kebijakan sistem pengelolaan sampah berupa peraturan daerah.

Kata kunci : Pengelolaan sampah, kebijakan

ABSTRACT

Garbage has become a national issue which needs to be koprohensif and integrated management. With the publication of Law Number 18 Year 2008 on Waste Management is expected to waste management will be better. In order to follow up the waste management area of the government in making policy area is strategic because it is directly related to the waste management area. This Petelitian using sociological juridical approach to analyzing data - data that is found then performed juridical through existing legislation. From the research that has been done Demak not yet have a policy on waste management system refers to the Act No. 18 of 2008. In the waste management system in accordance with the laws that waste reduction and waste management. Waste reduction to include restrictions on waste generation, recycling and reuse waste. While waste management consists of the operational aspects, legal and institutional aspects. In Demak district in waste management is still using the old system, namely gathering, transport and waste. Waste management rules are still using the Regional Regulation No. 17 of 1991 on the order, cleanliness and beauty of the Territory of the Regency of Demak. The local government has the authority to regulate waste management respective regions so that the necessary local regulations in accordance with the law - waste management legislation. Suggestions put forward for government investigators Demak: the need to change the paradigm of waste management systems, the need for serious attention of local leaders in the waste management system, immediately sit down with between Regent and Parliament in making policy waste management system in the form of local regulations.

Keywords: Waste management, policy